

ANALISIS PERTUMBUHAN, PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KEMISKINAN PROVINSI SUMSEL

Tri Wibowo

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin 1 Gd.RM.Notohamiprodjo Lt.8 Jakarta Pusat Telp. 081388190866
Email : 3wibowo@gmail.com

Diterima : 18/01/2013 Direvisi : 18/04/2013 Disetujui : 30/04/2013

ABSTRAK

Sejalan dengan pembangunan nasional, strategi pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan bersifat pro growth, pro jobs, dan pro poor. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian nasional, dengan memberikan sumbangan sebesar 3 persen terhadap perekonomian nasional. Provinsi Sumsel telah berhasil mengatasi penyerapan tenaga kerja, tetapi perlu percepatan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Hasil analisis tipologi Klassen, 10 Kabupaten/Kota atau 2/3 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, berada dalam tahap berkembang pesat. Pembangunan di Provinsi Sumsel perlu diprioritaskan untuk 10 Kabupaten/Kota yang masih siap untuk berkembang tersebut dan diarahkan pada sektor yang padat karya, seperti sektor pertanian dan industri, sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang inklusif. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 11,05 ribu orang dan mengurangi angka kemiskinan sebesar 11,08 ribu orang.

Kata Kunci : Pertumbuhan, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan

ANALYSIS OF GROWTH, POVERTY AND LABOR ABSORPTION SOUTH SUMATRA PROVINCE

ABSTRACT

Synchronize with the national development strategy of development in the province of South Sumatra is pro-growth, pro-jobs, and pro-poor. South Sumatra Province has a major contribution in the national economy, with a 3 percent contribution to the national economy. South Sumatra province have overcome employment, but need an acceleration in economic growth and poverty reduction. The results of the analysis of the typology Klassen, 10 districts/cities or 2/3 which is in South Sumatra Province, located in the rapidly growing phase. Development in South Sumatra province to be prioritized to 10 districts/cities that are still ready for the growing attention for the labor-intensive sectors, such as agriculture and industry, so that the level of unemployment and poverty can be reduced for the acceleration of an inclusive growth. The results of the sensitivity analysis showed that the increased 1 percent of economic growth, generate employment amounted to 11.05 thousand people and reducing poverty by 11.08 thousand people.

Keywords:

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia telah menuai berbagai prestasi dan penghargaan dalam skala global. Prestasi ini terlihat dari pengakuan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organization of Economic and Cooperation Development*). Wujud pengakuan tersebut adalah masuknya Indonesia bersama Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan kedalam kelompok '*enhanced engagement countries*' atau negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya dengan negara-negara maju. Indonesia juga tergabung dalam kelompok Group-20 atau G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia, yang memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global.

Indonesia telah dianggap berhasil mengatasi krisis global tahun 2009 sebagai imbas dari krisis di kawasan Eropa. Perekonomian Indonesia tahun 2009 telah mampu melewati tahun penuh tantangan dengan capaian yang cukup baik. Meskipun melambat dibandingkan dengan tahun 2008, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 dapat mencapai 4,6 persen, tertinggi

ketiga di dunia setelah China dan India. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di tengah kontraksi perekonomian global tersebut dapat dihindari, karena struktur ekonomi yang banyak didorong oleh permintaan domestik. Pada tahun 2010 perekonomian nasional tumbuh 6,2 persen, 2011 naik lagi menjadi 6,5 persen, dan tahun 2012 kembali turun 6,2 persen.

Suksesnya pembangunan perekonomian nasional tersebut tidak akan terwujud tanpa didukung pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan perekonomian nasional merupakan agregasi dari perekonomian daerah. Suksesnya perekonomian nasional sangat tergantung dari suksesnya perekonomian daerah. Oleh karena itu, melalui Perpres 5 tahun 2010 Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RPJMN ini merupakan bahan dan pedoman daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga terwujud sinkronisasi antara pembangunan pusat dan daerah.

Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, merupakan lanjutan

RPJMN sebelumnya, dimana telah ditetapkan empat strategi pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth, pro job, pro poor* dan *pro environment*. Melalui strategi *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja tercipta (*pro job*) sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan (*pro poor*), serta memperkuat perekonomian untuk menghadapi berbagai goncangan. Pembangunan ini tentu harus ramah lingkungan *pro environment*), sehingga dapat berkelanjutan.

Salah satu provinsi yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional adalah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Provinsi Sumsel memberikan kontribusi (*share*) sebesar 3 persen terhadap perekonomian nasional, atau menempati urutan sembilan terbesar dari 33 provinsi di Indonesia. Sumbangan ini hanya kalah dari Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kaltim dan provinsi yang ada di pulau Jawa. Total kontribusi 6 Provinsi yang ada di

Jawa sebesar 58 persen, kontribusi paling kecil Provinsi DIY (sebesar 0,9 persen) dan terbesar Provinsi DKI Jakarta (16,3 persen). Dengan kontribusi tersebut, potensi pengembangan Provinsi Sumsel dalam kancah perekonomian nasional tidak dapat dipandang sebelah mata.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2006 – 2010), rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel hanya sebesar 5,13 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional yang sebesar 5,62 persen⁽¹¹⁾. Dari penyerapan tenaga kerja, Provinsi Sumsel termasuk berhasil mengatasi pengangguran. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumsel sebesar 5,6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka tingkat nasional yang mencapai 6,3 persen. Meskipun tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumsel relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, namun tingkat kemiskinan di Provinsi Sumsel belum mampu menunjukkan arah yang sama. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan Provinsi Sumsel (15,5 persen) berada diatas rata-rata nasional (13,47 persen).

Permasalahan

Bagaimana gambaran pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan kemiskinan di Provinsi Sumsel : 1) Seberapa besarkah pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan; 2) Bagaimana diskripsi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel terkait dengan strategi *pro growth, pro job* dan *pro poor* ?

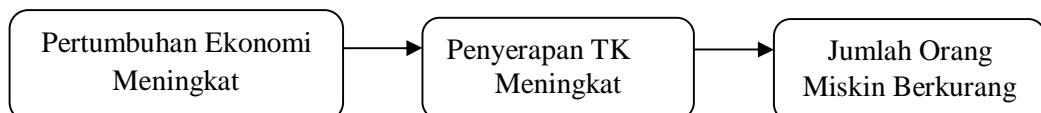
Tujuan Penelitian

Penulisan artikel ini bertujuan untuk : 1) Ingin mengetahui gambaran pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan kemiskinan di Provinsi Sumsel; 2) Ingin mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan; 3) Ingin mengetahui diskripsi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel terkait dengan strategi pembangunan *pro growth, pro job* dan *pro poor*

METODOLOGI

Metode analisis yang digunakan dalam artikel ini adalah metode diskriptif dan kuantitatif. Metode diskriptif digunakan untuk memaparkan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan tingkat kemiskinan. Alat analisis dengan menggunakan grafis, tabulasi, serta diagram kartesius. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti. Alat analisis yang digunakan adalah sensitivitas pertumbuhan ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja serta pengurangan jumlah orang miskin. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sakernas, Indikator Perekonomian Daerah, serta data Provinsi Sumsel dalam Angka dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data-data Bappeda Provinsi Sumsel. Periode analisis dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012.

Kerangka analisis model (*Logic Model*) dibangun berdasarkan strategi pembangunan nasional, yang diperoleh hubungan sebagai berikut :



Hubungan tersebut dapat dicari nilai sensitivitas pertumbuhan ekonomi

terhadap penyerapan tenaga kerja ($E_{tk/pdrb}$) yang dihitung dengan rumus:

$$E_{tk/pdrb} = \frac{\Delta TK}{PDRB} \dots\dots\dots (1)$$

Sedangkan sensitivitas tenaga kerja terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin ($E_{m/tk}$) dihitung dengan rumus :

$$E_{m/tk} = \frac{\Delta miskin}{\Delta TK} \dots\dots\dots (2)$$

dimana PDRB pertumbuhan ekonomi daerah, ΔTK adalah tambahan penyerapan tenaga kerja, dan $\Delta miskin$ pengurangan jumlah penduduk miskin.

Untuk melihat kondisi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan digunakan analisis tipologi Klassen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan produk domestik regional bruto masing-masing kapita pada masing-masing kabupaten/kota. Sumbu vertikal adalah pertumbuhan pertumbuhan ekonomi daerah, dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horizontal. Kabupaten/kota yang diamati dapat dibagi menjadi empat golongan, yaitu: (i) Kabupaten/kota yang cepat maju dan cepat tumbuh

(*high growth and high income*), (ii) kabupaten/kota maju tapi tertekan (*high income but low growth*), (iii) kabupaten/kota yang berkembang cepat (*high growth but low income*), serta (iv) Kabupaten/kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*).

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat banyak teori pertumbuhan ekonomi tetapi tidak satu teori pun yang komprehensif sehingga dapat menjadi standar yang baku, karena masing-masing teori memiliki kekhasan sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang teori tersebut. Teori Keynes yang juga disempurnakan oleh teori Harrod-Domar yang mengembangkan sisi permintaan agregat sering disebut pendekatan modern dalam makroekonomi ⁽⁷⁾.

Dalam teori Keynes, pengeluaran investasi (I) mempengaruhi permintaan agregat (Z) tetapi tidak mempengaruhi penawaran agregat (S). Menurut teori Harrod-Domar, pengeluaran investasi (I) tidak hanya mempunyai pengaruh (proses multiplier efek) terhadap permintaan agregat (Z), tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam proses

waktu yang lebih panjang, I menambah stok kapital (misalnya pabrik, infrastruktur). Sehingga $I = \Delta K$, dimana K adalah stok kapital dalam masyarakat. Ini berarti pula peningkatan kapasitas produksi masyarakat, dan selanjutnya menggeser kurva S ke kanan⁽⁷⁾.

Lebih lanjut Harrod-Domar⁽⁷⁾ mengatakan bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat (K) meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output (Q^P). Q^P adalah output potensial yang bisa dihasilkan dengan stok kapital (kapasitas pabrik) yang ada. Hubungan antara K dan Q^P adalah sebagai berikut :

$$Q^P = h.K \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

Dimana h menunjukkan berapa unit output yang bisa dihasilkan dari setiap unit kapital. Koefisien ini diberi nama *output-capital ratio*, dan sebaliknya, $1/h$ adalah *capital-output ratio*. Hubungan antara K dan Q^P adalah proporsional, apabila K naik dua kali lipat, maka Q^P juga naik dua kali lipat.⁽¹⁾

Sehingga, apabila suatu tahun terjadi investasi sebesar I , maka stok kapital pada akhir tahun tersebut akan bertambah sebesar $\Delta K = I$. Selanjutnya penambahan kapasitas ini

akan meningkatkan output potensial sebesar :

$$\Delta Q^P = h. \Delta K = h. I \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

Kenaikan tingkat output potensial menggeser kurva penawaran agregat (S) ke kanan. Harrod-Domar menganggap bahwa masyarakat mempunyai (dan kecenderungan berkonsumsi menabung) yang merupakan prosentase dari pendapatannya. Harrod-Domar menganggap bahwa :

$$C = c.Y \text{ atau } S = s.Y \\ \text{dimana } s = 1 - c \quad \dots \dots \dots \quad (5)$$

Dalam teori multiplier, tingkat investasi I akan menimbulkan permintaan agregat sebesar :

$$Z = \frac{1}{1-c} I = \frac{1}{s} I \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$

Syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian selalu menggunakan kapasitas pabriknya secara penuh yaitu agar $Z = Q^P$ adalah sebagai berikut :

$\Delta Q^P = h. I$ agar $Z = Q^P$ maka $\Delta Z = h. I$ dengan menggabungkan persamaan diatas akan diperoleh :

$$\frac{\Delta Z}{Z} = s.h = \frac{\Delta Q^P}{Q^P} = g_w \quad \dots \dots \dots \quad (7)$$

Dimana g_w adalah *warranted rate of growth*, yang merupakan laju pertumbuhan yang menjamin

keseimbangan antara output potensial dan permintaan agregat dalam jangka panjang.

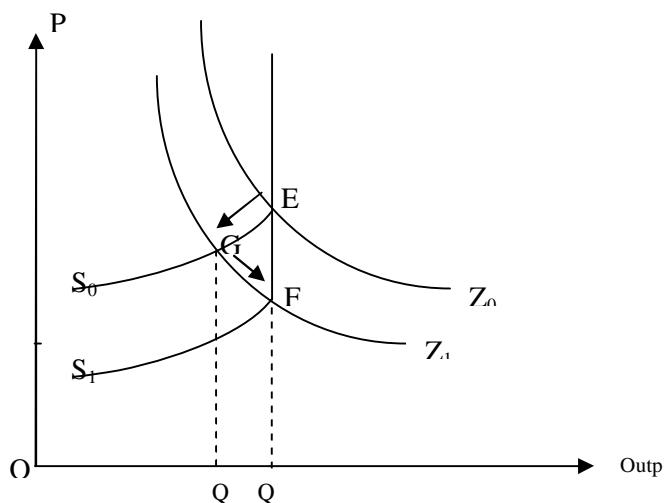
Keseimbangan Tenaga Kerja

Permasalahan yang sering muncul dalam ketenagakerjaan adalah terjadinya ketidak seimbangan antara permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah. Kelebihan penawaran tenaga kerja akan mengakibatkan *excess supply of labor*, sedangkan apabila permintaan lebih besar daripada

penawaran tengaka kerja akan mengakibatkan terjadinya *excess demand for labor* dalam pasar tenaga kerja.

Boediono (7), terkait dengan pasar tenaga kerja menyampaikan bahwa semua harga-harga (termasuk harga tenaga kerja, yaitu upah) fleksibel ke atas maupun kebawah, dan pelaku ekonomi bereaksi secara cepat dan rasional terhadap perubahan harga tersebut, sehingga penyimpangan dari posisi "*full employment*" hanya bersifat sementara. Kondisi tersebut seperti dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.

Gambar 1.
Keseimbangan Tenaga Kerja



Pada awalnya keseimbangan berada posisi E dengan tingkat output sebesar Q_F yang akan menyerap seluruh angkatan kerja atau tingkat output "*full employment*". Apabila terjadi penurunan permintaan agregat dari Z_0

ke Z_1 . Reaksi pertama dalam perekonomian adalah menurunnya output dari Q_F ke Q_1 (atau pergerakan E ke G) yang diikuti dengan adanya pengangguran tenaga kerja. Tetapi pengangguran ini hanya bersifat

sementara, karena adanya para pengangguran atau kelebihan tenaga kerja akan mendorong tingkat upah turun. Menurunnya tingkat upah berarti akan menurunkan biaya marginal (*marginal cost*) untuk menghasilkan output. Karena harga salah satu input variabel (upah tenaga kerja) menjadi lebih murah, maka biaya total akan menjadi turun, akibatnya kurva penawaran agregat bergeser ke bawah dari S_0 ke S_1 .

Tingkat upah akan menurun terus selama masih terjadi pengangguran, dan kurva penawaran agregat juga akan terus bergeser ke bawah. Proses ini akan berhenti apabila semua orang telah bekerja kembali, atau dengan perkataan lain bila tingkat output "*full employment*" tercapai kembali. Kondisi ini ditunjukkan oleh pergerakan dari G ke F. Posisi keseimbangan baru ini ditandai oleh : (a) tercapainya output "*full employment*" dan (b) tingkat harga-harga dan tingkat upah yang lebih rendah.

Proses menuju posisi *equilibrium* baru, kadang-kadang memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada berapa besar hambatan-hambatan yang merintangi proses tersebut, termasuk diantaranya: (a) ketegaran dan fleksibilitas yang tidak sempurna

dari harga-harga dan upah meskipun pengangguran ada dimana-mana, dan (b) kelambatan reaksi para pelaku ekonomi (produsen, konsumen, buruh) terhadap situasi ekonomi yang baru karena misalnya, tidak diperolehnya informasi yang cukup ⁽⁷⁾.

Kemiskinan

Badan Pusat Statistik⁽⁶⁾ , mendefinisikan kemiskinan ke dalam beberapa terminologi seperti, kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Biasanya kemiskinan relatif ini difokuskan kepada distribusi pendapatan.

Bank Dunia menghitung garis kemiskinan absolut dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$ PPP (*Purchasing power parity/paritas daya beli*), bukan nilai tukar US\$ resmi. Tujuannya adalah untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan

barang dan jasa dimana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$1 di Amerika. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank dunia, yaitu : a) US\$ 1 PPP Perkapita per hari ; b) US\$ 2 PPP Perkapita perhari . Ukuran tersebut direvisi menjadi US\$ 1,25 PPP dan US\$ 2 PPP per kapita per hari. ⁽¹²⁾

Pendapatan per kapita yang tinggi sama sekali bukan merupakan jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah yang besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain disebabkan dari struktur pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di negara yang bersangkutan, berbagai pengaturan politik dan kelembagaan yang dalam prakteknya ikut menentukan pola-pola distribusi pendapatan nasional ⁽³⁾.

Menurut Simon Kuznets (dalam Ravillion,⁽¹⁷⁾ terdapat korelasi positif atau negatif dalam jangka panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Hubungan antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi.

Ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan dari pertanian lebih kecil. Hubungan tersebut memberikan arti bahwa terjadi evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (pertanian) ke ekonomi perkotaan (industri).

Gambaran Umum Pembangunan Provinsi Sumsel

Ravillion (2004)⁽¹⁶⁾ menyatakan terdapat dua definisi yang berbeda dari "*pro-poor growth*" Definisi pertama adalah situasi di mana setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan disertai dengan berkurangnya kemiskinan. Definisi kedua berfokus pada perubahan ketimpangan selama proses pertumbuhan. *Pro-poor growth* menurut definisi ini mensyaratkan bahwa pendapatan penduduk miskin tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi dibanding penduduk yang tidak miskin. Pada Bab ini dibahas bagaimana posisi Provinsi Sumsel dalam skala nasional. Terminologi yang digunakan untuk dalam artikel ini *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor* adalah tingkat pertumbuhan yang dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Strategi pembangunan *pro growth, pro job, pro poor*

Strategi pembangunan *pro growth, pro job, dan pro poor*, sebagaimana telah dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), secara hierarki telah dijabarkan oleh pemerintah daerah Sumsel menjadi RPJMD. Penjabaran strategi pembangunan tersebut dapat dilihat dari upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Sumatera Selatan sejahtera dan terdepan bersama masyarakat cerdas yang berbudaya. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 mengacu pada tiga arus utama perubahan, yaitu Reorientasi, Reposisi dan Revitalisasi (3R-Change).⁽¹⁾ Strategi kebijakan ini memungkinkan terjadinya keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga lebih efektif, efisien dan professional; sebagai upaya pelaksanaan program pembangunan *pro growth, pro job, pro poor* Provinsi Sumsel.

Posisi Strategi *pro growth, pro job, pro poor* Provinsi Sumsel

Kontribusi perekonomian Provinsi Sumsel terhadap perekonomian

nasional yang ditunjukkan dari ratio PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDB nasional dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 berada pada kisaran 3 persen. Namun apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional, Provinsi Sumsel berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai cerminan kinerja strategi *Pro Job*, Provinsi Sumsel cukup sukses mengatasi pengangguran yang dapat dilihat dari TPT Provinsi Sumsel berada dibawah TPT nasional. Sementara itu, Provinsi Sumsel masih dihadapkan pada masalah tingkat kemiskinan yang cukup tinggi melebihi tingkat kemiskinan nasional. Untuk lebih jelasnya potret Strategi *pro growth, pro job, pro poor* Provinsi Sumsel dimata nasional disajikan dalam Diagram Kartesius⁽²⁾ berikut ini.

Pro Growth dan Pro Job

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel selama periode 2006 sampai dengan 2011 sebesar 5,39 persen, nilai ini berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,64 persen. Sementara itu, dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Sumsel diperoleh rata-

rata sebesar 6,76 persen, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata TPT nasional yang besarnya mencapai 7,22 persen. Dengan kondisi ini Provinsi

Sumsel berada pada kuadran 3. Dalam Kuadran Kartesius disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 2
Posisi Prov Sumsel dalam Pertumbuhan dan Pengangguran Nasional

		Tingkat Pengangguran Terbuka nasional (7,22 %) Rata-rata tahun 2006 - 2012			
Pertumbuhan ekonomi nasional (5,64 %)	Rata-rata tahun 2006 - 2011	Sumbar	Kalsel	Sumut	Sulteng
		Jambi	Sulut	Kepri	Sulsel
		Bengkulu	Sultra	DKI	Gorontalo
		Jatim	Sulbar	Jabar	PapuaBarat
		Bali	Malut	Banten	
		Kalteng			
		Riau	Kalbar		
		SUMSEL	Kaltim	NAD	
		Lampung	NTB	Maluku	
		Babel	NTT		
		Jateng	Papua		
		DIY			

Sumber : Hasil Analisis

Meskipun berada pada Kuadran 3, namun tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel tidak terpaut banyak dengan rata-rata nasional. Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen per tahun, posisi Provinsi Sumsel sudah berada pada kuadran 4 yang merupakan kuadran ideal, dimana tingkat pertumbuhan tinggi disertai dengan tingkat pengangguran yang rendah.

Pro Growth dan Pro Poor

Rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sumsel selama periode 2007 sampai dengan 2012 sebesar 16,11 persen, nilai ini berada diatas rata-rata tingkat kemiskinan nasional pada periode yang sama dengan nilai sebesar 13,99 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen yang berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,64 persen. Dengan

angka ini, Provinsi Sumsel berada pada kuadran 2. Pertumbuhan lebih rendah dari rata-rata nasional, sementara

tingkat kemiskinan berada diatas rata-rata nasional.

Gambar 3.
Posisi Prov Sumsel dalam Pertumbuhan dan Kemiskinan Nasional

		Tingkat Kemiskinan nasional (13,99 %) Rata-rata tahun 2007 - 2012			
Pertumbuhan ekonomi nasional (5,64 %) Rata-rata tahun 2006 - 2011		Sumut Bali Sumbar Kalsel Jambi Sulteng Kepri Sulsel DKI Gorontalo Jabar Malut Banten			
		Riau Babel Kaltim			
		Bengkulu Jatim Kalteng Sultra Sulbar Papua Barat			
		Aceh Kalbar SUMSEL NTB Lampung Maluku Jateng Papua DIY			

Sumber : Hasil Analisis

Meskipun dari rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sumsel masih berada diatas rata-rata nasional, namun jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin Provinsi Sumsel sebesar 1,33 juta jiwa, turun menjadi 1,06 juta jiwa pada tahun 2012; atau rata-rata mengalami penurunan sebanyak 50 ribu orang per tahun.

Rata-rata pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Sumsel diperoleh rata-rata sebesar 6,76 persen, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata TPT nasional yang besarnya mencapai 7,22 persen. Sementara itu, rata-rata tingkat kemiskinan nasional pada periode yang sama dengan nilai sebesar 13,99 persen. Dengan kondisi ini Provinsi Sumsel berada pada kuadran 2. Dalam Kuadran Kartesius disajikan dalam gambar berikut ini.

Pro Job dan Pro Poor

Gambar 4.
Posisi Pertumbuhan dan Pengangguran Provinsi Sumsel

		Tingkat Kemiskinan nasional (13,99 %) Rata-rata tahun 2007 - 2012			
Tingkat Pengangguran Terbuka nasional (7,22 %)	Rata-rata tahun 2006 - 2012	Sumut	Banten	NAD	
		Kepri	Sulteng	Maluku	
		DKI	Sulsel	Papua Barat	
		Jabar	Gorontalo		
		Sumbar	Kalsel	SUMSEL	Kalteng
		Riau	Kaltim	Bengkulu	Sultra
		Jambi	Sulut	Lampung	Sulbar
		Babel	Malut	Jateng	NTB
		Bali		DIY	NTT
				Jatim	Papua
				Kalbar	

Sumber : Hasil Analisis

Dengan berada pada Kuadran 2, dimana rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sumsel lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan Tingkat pengangguran berada dibawah rata-rata nasional; menjadikan indikasi bahwa pendapatan yang diterima belum memadai untuk mencukupi kebutuhan. Salah satu tipikal tingginya angkatan kerja suatu daerah yang sebagian besar tergantung pada sektor pertanian adalah rendahnya upah / produktivitas. Program pembangunan Provinsi Sumsel perlu diprioritaskan pada sektor pertanian agar pendapatan petani bisa lebih meningkat.

Sensitivitas Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Kemiskinan

Pada Bab ini pembahasan difokuskan pada posisi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumsel. Dengan pembahasan ini untuk mengetahui lebih detail deskripsi pertumbuhan,tenaga kerja dan kemiskinan di Kabupaten /Kota pada Propinsi Sumsel.

Dengan percepatan pertumbuhan ekonomi akan makin banyak tercipta kesempatan kerja (job), sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan (poor). Jika strategi ini berhasil, dengan pertumbuhan ekonomi membaik, akan tercipta lapangan kerja

sehingga pengangguran berkurang, dan dengan terciptanya lapangan pekerjaan pendapatan masyarakat menjadi meningkat sehingga kemiskinan berkurang.

Tipologi Klassen

Pemetaan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumsel penting dilakukan untuk mengetahui potensi masing-masing kabupaten/kota tersebut dalam pengembangan ke depan. Untuk analisis ini digunakan Dalam analisis dengan tipologi Klassen. Sebagai sumbu vertikal adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel, sedangkan sebagai sumbu horisontal digunakan rata-rata pendapatan per kapita dengan mengeluarkan sektor migas. Keterbatasan ketersediaan data, periode analisis adalah dari tahun 2008 sampai dengan 2010. Hasil

analisis dengan typology Klassen diperoleh Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel dapat digolongkan menjadi 4 golongan sebagai berikut : 1) Kabupaten/kota yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), adalah Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim; 2) Kabupaten/kota yang maju tapi tertekan (*high income but low growth*), adalah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ulu; 3) Kabupaten/Kota yang berkembang cepat (*high growth but low income*), adalah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Oku, Kabupaten Oku Selatan, dan Kabupaten Oku Timur; 4) Kabupaten/kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Kota Pagar Alam.

Tabel 1.
ekonomi dan Pendapatan Per Kapita Kab/Kota di Prov. Sumsel
Tahun 2008 - 2010

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Pertumbuhan	Rata-rata Per Kapita (Rp. Juta/Org)	Kuadran
1	Banyuasin	5,62%	9,70	4
2	Empat Lawang	5,44%	8,63	4
3	Kt. Lubuk Linggau	6,40%	9,87	4
4	Kt. Pagar Alam	4,04%	9,47	3
5	Kt. Palembang	6,39%	22,62	1
6	Kt. Prabumulih	5,01%	13,34	4
7	Lahat	5,81%	12,55	4

8	Muara Enim	5,25%	16,04	1
9	Musi Banyuasin	2,86%	19,38	2
10	Musi Rawas	5,29%	9,77	4
11	Ogan Ilir	5,36%	8,42	4
12	Oko Ilir	5,44%	8,74	4
13	Oko Ulu	4,80%	15,20	2
14	Oko Ulu Selatan	5,66%	7,90	4
15	Oko Ulu Timur	5,36%	8,10	4
Rata-rata Sumsel		4,94%	13,58	

Sumber : Hasil Analisis

Dari penggolongan dengan menggunakan analisis typologi Klassen dapat diketahui bahwa Provinsi Sumsel baru dalam tahap berkembang cepat. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar (2/3 bagian, 10 dari 15 Kabupaten/Kota) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel berada pada kuadran *high growth but low income*.

Dengan potensi ini, arah pembangunan di Provinsi Sumsel perlu diprioritaskan untuk 10 Kabupaten/Kota yang masih siap untuk berkembang, namun dengan pendapatan yang rendah. Pengembangan pembangunan perlu diarahkan ke sektor yang padat karya, seperti sektor pertanian dan industri, sehingga tingkat penganguran dan kemiskinan dapat ditekan dan akan tercipta pertumbuhan yang inklusif (*inclusive growth*). Disisi lain, Kota Pagar Alam juga perlu mendapat prioritas pembangunan karena merupakan daerah dengan rata-rata pendapatan per kapitanya rendah

serta tingkat pertumbuhan yang lambat sehingga masuk dalam kategori yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) dibanding 14 Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Sumsel.

Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumsel, akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Secara keseluruhan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel mencapai 4,94 persen, akan menambah penyerapan tenaga kerja sebesar 54,6 ribu orang. Dengan kata lain, setiap 1 persen kenaikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumsel, akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 11 ribu orang.

Dari ke-15 kabupaten/kota di Propinsi Sumsel, nilai sensitivitas tambahan penyerapan tenaga kerja

akibat adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, terbesar terjadi pada Kabupaten Banyuasin. Setiap kenaikan 1 persen PDRB Kabupaten Banyuasin akan mampu menambah penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.023 orang. Sehingga Kabupaten Banyuasin menempati skala prioritas tinggi untuk dapat dikembangkan karena mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding Kabupaten/Kota yang lain

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama.

Besarnya nilai sensitivitas di Kabupaten Banyuasin ini sejalan dengan analisis Typologi Klassen, dimana Kabupaten Banyuasin sedang dalam kondisi berkembang cepat (*high growth but low income*). Secara lebih lengkap nilai sensitivitas pertambahan tenaga kerja akibat kenaikan pertumbuhan ekonomi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.
Sensitivitas Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2008 - 2010

No.	Kabupaten/Kota	Rata2 Pert	Rata2 Tambahan TK (Orang)	Tambahan TK (Orang) tiap 1 % PDB
1	Banyuasin	5.62%	5,754	1,023
2	Empat Lawang	5.44%	1,209	222
3	Kt. Lubuk Linggau	6.40%	708	111
4	Kt. Pagar Alam	4.04%	551	136
5	Kt. Palembang	6.39%	3,304	517
6	Kt. Prabumulih	5.01%	784	157
7	Lahat	5.81%	3,180	547
8	Muara Enim	5.25%	4,936	941
9	Musi Banyuasin	2.86%	5,554	1,939
10	Musi Rawas	5.29%	4,753	899
11	Ogan Ilir	5.36%	3,284	612
12	Oko Ilir	5.44%	3,156	580
13	Oko Ulu	4.80%	2,457	511
14	Oko Ulu Selatan	5.66%	1,818	321
15	Oko Ulu Timur	5.36%	4,452	831
Rata-rata Sumsel		4.94%	54,585	11,057

Sumber : Hasil Analisis

Tenaga Kerja dan Kemiskinan

Dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, penghasilan rumah tangga akan meningkat, dan demikian

pula daya beli masyarakat. Seiring meningkatnya daya beli, pengeluaran rumah tangga menjadi lebih besar dan apabila melebihi batas garis

kemiskinan, maka rumah tangga tersebut keluar dari kemiskinan. Namun demikian, tidak semua dari 15 kabupaten/kota yang berada di Propinsi Sumsel kemiskinannya berkurang selama periode pengamatan. Kota Pagar Alam dan Kabupaten Oku Ulu karena pertumbuhan ekonominya relatif

lambat, pertambahan tenaga kerja akibat peningkatan pertumbuhan ekonomi, secara keseluruhan belum mampu mengerem penurunan kemiskinnya. Hasil analisis sensitivitas tambahan penyerapan tenaga kerja terhadap pengurangan kemiskinan untuk kabupaten/kota di Provinsi Sumsel di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.
Sensitivitas Tenaga Kerja dan Pengurangan Kemiskinan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2008 - 2010

No.	Kabupaten/Kota	Rata2 Tambahan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Pengurangan Kemiskinan (Orang)	Tiap Tambahan TK 1000 org, Kemiskinan Berkurang (org)
1	Banyuasin	5,754	(3,800)	(660)
2	Empat Lawang	1,209	(2,500)	(2,067)
3	Kt. Lubuk Linggau	708	(1,100)	(1,553)
4	Kt. Pagar Alam	551	167	303
5	Kt. Palembang	3,304	(4,733)	(1,433)
6	Kt. Prabumulih	784	(900)	(1,147)
7	Lahat	3,180	(6,333)	(1,992)
8	Muara Enim	4,936	(8,267)	(1,675)
9	Musi Banyuasin	5,554	(9,867)	(1,777)
10	Musi Rawas	4,753	(13,000)	(2,735)
11	Ogan Ilir	3,284	(6,133)	(1,868)
12	Oko Ilir	3,156	(800)	(253)
13	Oko Ulu	2,457	2,767	1,126
14	Oko Ulu Selatan	1,818	(2,067)	(1,137)
15	Oko Ulu Timur	4,452	(4,367)	(981)
Rata-rata Sumsel		54,585	(58,267)	(1,067)

Sumber : Hasil Analisis

Hasil gabungan dari perhitungan diatas di peroleh sensitivitas pertumbuhan

ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan sebagai berikut :

(i) Kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi → menambah TK = 11.057 orang, (ii). Kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi → mengurangi kemiskinan = 11.083 orang.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai berikut :

1. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kontribusi perekonomian besar dalam nasional dengan memberikan sumbangan rata-rata sebesar 3 persen selama periode 2006 sampai dengan 2011. Walupun kontribusi tersebut cukup signifikan, namun dari sisi pertumbuhan ekonomi, Provinsi Sumatera Selatan masih dibawah rata-rata nasional. Potensi ekonomi Provinsi Sumatera Selatan yang besar, namun belum berjalan optimal.
2. Dalam penyerapan tenaga kerja, Provinsi Sumatera Selatan lebih unggul dibanding rata-rata nasional. Namun penyerapan tenaga kerja yang tinggi tersebut belum berhasil menekan angka kemiskinan. Rata-rata angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan masih sebesar 16,1 persen, lebih tinggi dibanding

rata-rata tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 13,9 persen. Jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan dengan rata-rata sebesar 50 ribu orang per tahun.

3. Setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel sebesar 1 persen, akan mampu menambah penyerapan tenaga kerja sebesar 11,05 ribu orang, dan akan mengurangi kemiskinan sebesar 11,08 ribu orang.
4. Provinsi Sumatera Selatan baru dalam tahap berkembang cepat. Hasil analisis Tipologi Klassen dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 10 Kabupaten/Kota berada pada kuadran *high growth but low income*.

SARAN

Dengan potensi ekonomi Provinsi Sumatera Selatan yang tinggi, arah pembangunan di Provinsi Sumsel perlu diprioritaskan untuk 10 Kabupaten/Kota yang masih siap untuk berkembang, namun dengan pendapatan yang rendah. Pengembangan pembangunan perlu diarahkan ke sektor yang padat karya, seperti sektor pertanian dan

industri, sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan dan akan tercipta pertumbuhan yang inklusif (*inclusive growth*). Perlu adanya studi lebih mendalam terkait struktur perekonomian masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sehingga strategi pembangunan dapat diselaraskan dengan melihat potensi masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. -----, Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013
2. -----, Sumatera Selatan Dalam Angka 2010, BPS, Provinsi Sumatera Selatan
3. -----, Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Menurut PDRB Lapangan Usaha 2010, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Bekerjasama dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan
4. -----, Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012 Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
5. ADB, 2012, Outlook 2012, Confronting Rising Inequality in Asia
6. BPS, 2007, Analisis Tipologi Kemiskinan Perkotaan, Studi Kasus di Jakarta Utara, BPS
7. Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta
8. Catherine Barber, 2008, Notes on Poverty and Inequality, Oxfam International 2008.
9. Emilia dan Imelia. 2006. Modul Ekonomi Regional. Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jambi. Jambi.
10. Haughton J. & Khandker S., 2009, Hand book on Poverty + Inequality, World Bank, washington
11. <http://www.bps.go.id> (diakses 08 Mei 2013)
12. <http://www.bappenas.go.id/node/165/3630/kemiskinan-di-indonesia-dan-penanggulangannya/> (diakses 15 Februari 2013)
13. <http://sukabumikab.bps.go.id/component/content/article/148-kemiskinan.html?start=1> (diakses 5 Februari 2012)
14. IMF, 2012, World Economic Outlook WEO), Growth Resuming Dangers Remain
15. Lincoln, Arsyad 2004, Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta
16. Ravallion, Martin, 2004, Pro-Poor Growth A Primer, World Bank Policy Research Working Paper 3242, March 2004

17. Ravallion, Martin, 2005, A Poverty-Inequality Trade-off? World Bank Policy Research Working Paper 3579, April 2005
18. Sharma, Manohar, 2011, Gabriela Inchauste, and Juan Feng "*Rising Inequality with High Growth and Falling Poverty*" www.worldbank.org/eapeye
19. Sjafrizal 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagaian Barat, Prisma LP3ES Jakarta
20. Sjafrizal, 2008, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi,
21. Tambunan, Tulus. 2006. Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis. Pustaka Quantum, Jakarta.
22. Tarigan, Robinson, 2004, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara
23. Tarigan, Robinson , 2005, Ekonomi Regional – Teori dan aplikasi, Bumi Aksara
24. Wodon, Quentin T. 1999, Growth, Poverty, and Inequality: A Regional Panel for Bangladesh